

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penguatan Karakter Pancasila di Kalangan Pelajar

Ikhwan Nugraha

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ikhwan.nugraha85@gmail.com

Aan Hasanah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
aanhasanah@uinsgd.ac.id

Bambang Samsul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
bambangamsularifin@uinsgd.ac.id

Suggested Citation:

Nugraha, Ikhwan; Hasanah, Aan; Arifin, Bambang Samsul. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penguatan Karakter Pancasila di Kalangan Pelajar. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Volume 1, Nomor 3: 158-169 . <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i3.21632>

Article's History:

Received June 2022; Revised July 2022; Accepted August 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This research is motivated by the current of globalization which has a very large negative impact, especially in changes in order and values. Cases of violence among students are clear evidence of this disruption. This certainly left trauma for the victims, some even had fatal consequences to death. The Indonesian nation is experiencing character degradation and has even almost lost its character. Therefore, this study aims to analyze the use of technology to strengthen character education among students according to Pancasila values. The research method is in the form of literature review (library research). Meanwhile, the findings of this study indicate that the wave of the industrial revolution 4.0 destroyed the previously established order or is called disruption. Disruption is defined as an era, in which there are massive changes and innovations that fundamentally result in changes to all existing orders, systems and landscapes, into new ways. Effective and appropriate strategies and implementation are needed as a response to these challenges, especially in the field of education. The era of technology that is developing at this time must be able to use existing facilities as well as possible because digital abilities (digital intelligence) are demands that students must have in the current era of globalization. Likewise the use of information technology in protecting character education, especially the Pancasila character, which is in accordance with the philosophy of the Indonesian nation.

Keywords: *technology and information, character education, Pancasila*

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh arus globalisasi yang membawa dampak negatif yang besar, utamanya dalam perubahan tatanan dan nilai. Kasus kekerasan di kalangan pelajar adalah bukti nyata terdapat gangguan tersebut. Hal itu tentunya meninggalkan trauma bagi para korban, bahkan ada yang berakibat fatal hingga meninggal. Bangsa Indonesia sedang mengalami degradasi karakter bahkan nyaris kehilangan karakternya. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi untuk penguatan pendidikan karakter di kalangan pelajar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Metode

penelitian berupa telaah kepustakaan (*library research*). Sementara, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adanya gelombang revolusi industri 4.0 menghancurkan tatanan yang sudah mapan sebelumnya atau disebut dengan disrupsi. Disrupsi diartikan sebagai suatu era, yang mana terjadi perubahan besar-besaran dan inovasi yang secara fundamental mengakibatkan perubahan pada semua tatanan, sistem, dan lanskap yang ada, menjadi cara yang baru. Strategi dan implemetasi yang efektif dan tepat diperlukan sebagai respon terhadap tantangan tersebut khususnya dalam bidang pendidikan. Era teknologi yang berkembang saat ini harus dapat dipergunakan fasilitas yang ada sebaik mungkin dikarenakan kemampuan digital (*digital intelligence*) merupakan tuntutan yang harus dimiliki peserta didik pada era globalisasi sekarang. Begitupun penggunaan teknologi infomrasi dalam dalam penanaman pendidikan karakter khususnya karakter Pancasila yang memang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.

Kata Kunci: teknologi dan informasi, pendidikan karakter, Pancasila

PENDAHULUAN

Pada saat teknologi informasi berevolusi dan digitalisasi menjadi anak kandungnya, dunia mengalami keadaan VUCA, yaitu gampang bergejolak (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), rumit (*complexity*), dan serba suram (*ambiguity*) yang disebut akan membuat manusia jadi rapuh (Mulyadi & Prakoso, 2021). Istilah ini awalnya diciptakan oleh militer Amerika untuk menggambarkan situasi geo-politik saat itu. Namun karena kesamaan makna, maka istilah VUCA kini diadopsi oleh dunia bisnis dan sektor publik. Contoh perubahan yang terjadi secara radikal adalah pandemi Covid 19, di mana seluruh penjuru dunia dilanda ketidakpastian, mulai dari negara berkembang hingga negara maju tanpa terkecuali. Sebagai akibat dari keadaan yang tidak pasti ini, maka dapat dibayangkan bagaimana terpuruknya hampir seluruh bidang termasuk pendidikan (Poernomo, 2020).

Kondisi ini menyebabkan empat tantangan utama; 1) Tantangan perubahan eskponensial yang begitu cepat seperti pola komunikasi. 2) Tantangan perubahan nilai. Internet tumbuh untuk promosi nilai-nilai baru yang usang seperti atheisme. 3) Tantangan kompetensi khususnya pelajar yang berada di level menengah ke atas dan perguruan tinggi. Saat ini terdapat dua kelompok utama yaitu *useless degree* dan *competent undegree*. 4) Tantangan literasi. Tumbuhnya beragam literasi yang dapat diakses dengan mudah, cepat, murah dan luas melalui perkembangan teknologi Informasi (Setia, 2021).

Salah satu tantangan yang paling besar berupa perubahan nilai terutama di kalangan pelajar. Pelajar sekarang cenderung mengalami keterlantaran emosi, yang pada akhirnya merupakan cikal bakal terjadinya perilaku-perilaku antisosial, seperti perkelahian antarpelajar, tawuran, narkoba, penganiayaan, asusila, tindakan-tindakan kekerasan. Kejadian-kejadian ini bisa terjadi dari level sekolah menengah sampai tingkat perguruan tinggi (Sugiyatno, 2010).

Berdasarkan data Simfoni PPA, di tahun 2021 saja terdapat 13.570 kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak khususnya pelajar (KEMENPPPA RI, 2022). Maraknya kekerasan di kalangan pelajar menjadi fenomena yang tidak terbantahkan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun sudah marak di lingkungan pedesaan. Perlu menjadi perhatian bersama semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah melakukan ratifikasi konvensi hak anak (*convention on the right of the child*) yang diintrodusir perserikatan bangsa-bangsa setahun sebelumnya. Dalam amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002, lahir pasal baru yang secara khusus bicara soal perlindungan anak, yaitu pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, Tumbuh dan berkembang, serta berhak atas*

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Untuk memenuhi komitmen tersebut pemerintah mengularkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan adanya penanganan khusus terhadap anak.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tersebut, Pasal 13 disebutkan bentuk kekerasan pada anak adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis (emosional), kekerasan seksual, kekerasan sosial dalam bentuk penelantaran, dan eksploitasi. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Meski demikian tindak kekerasan di lingkungan sekolah trennya semakin meningkat

Hal tersebut erat kaitannya dengan proses perubahan masyarakat (Ismail, 2022). Proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang baru secara seimbang, adanya progres/kemajuan dan berkesinambungan. Pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang dan tidak relevan lagi akan diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang dan masa mendatang. Disisi lain yang dominan dalam perubahan itu sendiri, tidak dapat dipungkiri karena adanya penemuan baru (*invention*), pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan kebudayaan (*culture*). Aspirasi seorang individu atau kelompok dalam melaksanakan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh inovasi dan adaptasi dari setiap teknologi yang baru muncul atau nampak di tengah-tengah masyarakat, baik teknologi yang berasal dari dalam negeri (*intern*) maupun luar negeri (*ekstern*) (Budijarto, 2018).

Oleh karena itu diperlukan respon cepat dan terukur menghadapi era ini. Respon yang bisa dilakukan adalah dengan Membangun *digital mindset* dan konsistensi internalisasi nilai-nilai karakter di kalangan pelajar. Era disrupsi teknologi menuntut pendidikan agar senantiasa responsif dan adaptif. Era ini ditandai semakin tidak terikat batas dan sekat baik waktu maupun tempat. Dalam konteks ini program Penguatan pendidikan karakter harus senantiasa mengikuti perkembangan tersebut agar dapat terkoneksi satu sama lain juga sebagai upaya pengembangan teori belajar kognitif berbasis teknologi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan karakter khususnya karakter Pancasila, diperlukan adanya rancangan, pelaksanaan, dan penilaian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guna menjaga agar pemanfaatan internet tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan peserta didik menjadi manusia berkarakter. Ditambahn proses penanaman penilaian pendidikan karakter lebih efektif harus ada penilaian. Lebih dari itu pemanfaatan teknologi informasi dalam penanaman karakter perlu kerjasama aktif dan kontinyuitas oleh setiap pihak utamanya orangtua atau masyarakat, guru dan pemerintah

METODE

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan telaah kepustakaan (*library research*). Sumber yang digunakan berupa sumber sekunder dari buku, jurnal, laporan dan dokumentasi lainnya yang sudah terpublikasi. Teknik penelitian dengan cara mengumpulkan, menganalisis, verifikasi dan mensintesa data sehingga dapat disajikan dalam interpretasi dari penulis serta penarikan kesimpulan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam penguatan karakter Pancasila di kalangan pelajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena kekerasan dalam pendidikan seolah memberikan gambaran bahwa kita sebagai bangsa sungguh lemah dalam mengendalikan emosi. Bangsa ini tumbuh tidak hanya menjadi bangsa yang miskin pengetahuan, tetapi juga mengalami kemerosotan nilai-nilai moral. Kita kehilangan kepekaan terhadap sesama, kasing sayang, penghargaan, dan budaya malu. Nilai-nilai kemanusiaan kita hilang, sebaliknya yang tumbuh adalah jiwa dan watak yang keras. Kekerasan dalam pendidikan tidak boleh dibiarkan berlarut larut, dan akar masalah harus segera ditemukan untuk dijadikan brainstroming dalam rangka mencari pemecahan masalah (Purnomo, 2009).

Di sisi lainnya, pendidikan kita dinilai terlalu menonjolkan sisi kognisi tetapi kurang dalam hal emosi dan moral. Sebagian bahkan menilai pendidikan Indonesia terkesan mekanistik, full hafalan dan mematikan kreativitas peserta didik. Kondisi ini mencemaskan berbagai pihak, apalagi dengan melihat pendapat Thomas Lickona bahwa terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa yaitu: (1) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) Ketidakjujuran yang membudaya, (3) Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orangtua, guru, dan figur pemimpin, (4) Pengaruh teman sebaya terhadap tindakan kekerasan, (5) Meningkatnya kecurigaan dan kebencian, (6) Penggunaan bahasa yang buruk, (7) Penurunan etos kerja, (8) Menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) Meningkatnya perilaku merusak diri, (10) Semakin kaburnya pedoman moral (Rachmah, 2013).

Dengan kata lain harus ada pokok-pokok paradigma baru pendidikan: (1) pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis; (2) masyarakat demokratis memerlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis; (3) pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang menjawab tantangan internal dan global; (4) pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis; (5) di dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengembangkan kemampuan berkompetisi di dalam rangka kerjasama; (6) pendidikan harus mampu mengembangkan kebhinekaan menuju kepada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan kebhinekaan masyarakat, dan (7) yang paling penting, pendidikan harus mampu mengIndonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi warga negara Indonesia (Tilaar, 2004).

Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan krisis moral. Salah satunya melalui pembangunan karakter bangsa yang direalisasikan dalam bidang pendidikan melalui pendidikan karakter. Pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam kebijakan ini. Pendidikan merupakan domain yang paling bertanggung jawab dalam melahirkan warga negara Indonesia yang memiliki karakter kuat sebagai modal dalam membangun peradaban tinggi dan unggul, karena karakter bangsa yang kuat merupakan produk dari pendidikan yang bagus dan mengembangkan karakter. Terlepas dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, makin mendorong semangat dan upaya pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan karakter sebagai dasar pembangunan pendidikan. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional (Nasional, 2011).

Karakter adalah nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakan dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dimaknai bahwa karakter

sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara (Samani & Hariyanto, 2011).

William dan Schnaps mendefinisikan pendidikan karakter sebagai usaha yang dilakukan oleh personel sekolah, bahkan dilakukan bersama-sama dengan orangtua dan anggota masyarakat, untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. Creasy juga menjelaskan bahwa pendidikan karakter dilakukan sebagai upaya untuk mendorong peserta didik tumbuh dan berkembang dengan kompetensi berfikir dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam hidupnya serta mempunyai keberanian melakukan yang benar meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan (Zubaedi, 2015). Lickona mengatakan pendidikan karakter sebagai upaya sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak, dengan landasan nilai-nilai etis (Samani & Hariyanto, 2011).

Pengelolaan pendidikan karakter di sekolah sangat kompleks. Program pendidikan karakter jarang menekankan kerangka moral dimana karakter dikembangkan, tetapi lebih berupa campuran konstruksi behavioris dan sosial kognitif. Pendidikan Karakter lebih fokus pada prestasi akademik dibanding penekanan karakter yang dibentuk dalam proses pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakter yang kurang efektif patut diduga sebagai salahsatu penyebab kurangnya kemampuan siswa dalam hal argumentasi moral. Hasilnya menunjukkan sebagian besar pelajar kurang dalam integrasi pendidikan karakter dalam konteks kehidupan di masyarakat (Fatah, 2021).

Pengelolaan pendidikan karakter yang dilaksanakan satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah: pertama, sosialisasi ke pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti masyarakat, komite sekolah, dan lembaga lain yang terkait; kedua, melalui pengembangan kegiatan sekolah; ketiga, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pendekatan belajar aktif seperti pendekatan belajar kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, pembelajaran berbasis kerja, dan ICARE (*Intoduction, Connection, Application, Reflection, Extension*) dan; keempat, melalui pengembangan budaya di sekolah dan pusat kegiatan belajar yang dilaksanakan dalam kegiatan rutin seperti upacara, piket kelas, salat berjamaah, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, serta mengucapkan salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik, dan teman (Alawiyah, 2012, pp. 87-101).

Paradigma di atas menjadikan suatu bangsa harus memiliki karakter dan budaya kuat dalam rangka keberlangsungan dan kemajuan peradabannya. Karakter dan budaya suatu bangsa harus dipertahankan sehingga dapat dibedakan antara bangsa yang satu dengan yang lainnya. karakter bangsa dapat terbangun melalui budaya yang ada dimasyarakat.

Bila dibandingkan dengan negara lain, dapat dilihat bahwa salah satu negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi dunia yaitu Jepang. Jepang bangkit pasca kehancuran Perang Dunia II. Pembangunan awal dilakukan melalui pembangunan karakter dengan menanamkan jiwa yang tidak pantang menyerah dan menjadikan pendidikan sebagai langkah awal dalam pembangunan bangsa yang saat itu sedang terpuruk. Hal ini dikarenakan sejak awal bangsa Jepang telah menyadari pentingnya identitas nasional yang kuat untuk menopang keberhasilan di bidang-bidang pembangunan lain (Prasetyo & Handayani, 2017, pp. 1-15).

Urgensi Pendidikan Karakter Pancasila

Untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia perlu melakukan pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan yang salah.

Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (*habituation*) hingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*). Sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik (Nasional, 2011, p. 6).

Salah satu rujukan penting yang merupakan kebijakan pemerintah adalah Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal. PPK adalah gerakan pendidikan yang dilaksanakan melalui penerapan nilai-nilai yang merupakan intisari dari nilai-nilai Pancasila. Ada 18 nilai utama, yaitu nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab (Irawati et al., 2022).

Kedepalan belas nilai diatas terangkum menjadi lima nilai kebangsaan, hasil reaktualisasi Pancasila:

1. Nilai religiusitas yakni nilai-nilai spiritual yang tinggi yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia yang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengajak semua komponen bangsa untuk beragama dan berkeyakinan secara berkebudayaan.
2. Nilai kekeluargaan, mengandung nilai-nilai kebersamaan dan senasib dan sepenanggungan dengan ideologi warga negara tanpa membedakan asal usul, agama-keyakinan, latar belakang sosial dan politik seseorang.
3. Nilai keselarasan, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan untuk memahami dan menerima budaya dan kearifan ideologi sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia.
4. Nilai kerakyatan, memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dalam merencanakan, merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat
5. Nilai keadilan, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada ideologi manusia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Ubaedillah, 2015, p. 52).

Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa yang semakin menurun. Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi baik dalam pengertian ideologi negara masih dipertahankan. Namun, seiring kesalahan tafsir bahwa Pancasila dipergunakan untuk memperkuat otoritarianisme negara. Salah satu ciri kekuasaan yang otoriter di manapun adalah selalu menganggap ideologi sebagai maha penting yang berhubungan erat dengan stabilitas atau kohesi sosial. Tetapi asumsi bahwa usaha menyeragamkan ideologi penting demi menciptakan stabilitas dan memperkuat kohesi masyarakat adalah menyesatkan (Rachmah, 2013). Individu yang telah dijiwai oleh sila-sila Pancasila melaksanakan nilai-nilai berikut:

- a. Karakter yang bersumber dari olah hati;

- b. Karakter yang bersumber dari olah pikiran;
- c. Karakter yang bersumber dari olah raga;
- d. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa (Abidin, 2017).

Pancasila perlu terus dibina, dikembangkan dan dilestarikan. Pembinaan karakter bangsa dengan nilai-nilai Pancasila bertujuan agar bangsa Indonesia mampu bersikap dan bertindak laku dengan sepatutnya sehingga mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan hidup sesuai dengan cita-cita bangsa. Dengan demikian sumber karakter adalah belief system yang telah terpatri dalam sanubari bangsa, serta tantangan dari luar sehingga membentuk sikap dan perilaku yang akan mengantar bangsa mencapai kehidupan yang sukses (Adi, 2020).

Perubahan Teknologi dan Pendidikan Karakter

Adanya gelombang revolusi industri 4.0 menghancurkan tatanan yang sudah mapan sebelumnya atau disebut dengan disrupsi. Disrupsi diartikan sebagai suatu era, yang mana terjadi perubahan besar-besaran dan inovasi yang secara fundamental mengakibatkan perubahan pada semua tatanan, sistem, dan lanskap yang ada, menjadi cara yang baru. Disrupsi mengakibatkan mereka yang masih menggunakan sistem atau cara yang lama menjadi tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah mengadopsi sistem yang baru. Disrupsi teknologi merupakan sebuah fenomena yang mengakibatkan perubahan pemahaman konvensional masyarakat dan segala aktivitas yang mereka lakukan menjadi sistem teknologi digital (Gabriel, 2022).

Teori belajar kognitif yang berakar pada teori pemrosesan informasi merupakan landasan dari pengembangan pembelajaran dengan teknologi. Teori ini memberikan kerangka umum bagi desainer pembelajaran dalam mengontrol kondisi belajar pada suatu lingkungan atau material pembelajaran. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh teori belajar konstruktivisme, komputer dimanfaatkan untuk membantu siswa menemukan dan merumuskan pengetahuannya melalui interaksi dan eksplorasi sumber-sumber belajar berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga mendukung teori *socioconstructivism*, yakni siswa memperoleh pengalaman belajar secara bersama-sama dengan siswa lain atau melalui interaksi para pakar dengan media komunikasi berbasis teknologi. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi juga menuntut kreativitas dan kemandirian diri sehingga memungkinkan mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik. Melalui penggunaan teknologi informasi setiap siswa akan terangsang untuk belajar berkelanjutan sesuai potensi dan kecakapan yang dimilikinya (Hasanah et al., 2022).

Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran, memerlukan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bentuk komunikasi baik bentuk cetak maupun audiovisual dan digunakan untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didik dengan harapan peserta didik dapat memahami materi yang diberikan oleh guru melalui perantar media, membentuk perasaan peserta didik yang termotivasi, dan menimbulkan kemauan kuat peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran melalui perangkat media. Media pembelajaran mempunyai kegunaan-kegunaan dalam proses pembelajaran:

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu bersifat verbal dapat berupa bentuk kata-kata tertulis atau lisan.
2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra yang di mana keterbatasan tersebut merupakan penghambat dari proses pembelajaran.

3. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pada peserta didik sehingga peserta didik dituntut untuk aktif dalam pembelajaran.
4. Media pembelajaran membantu para guru untuk meringankan proses pengajaran kepada peserta didik yang bermacam-macam gaya belajarnya.

Media pembelajaran memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk mengeksplorasi cara belajarnya sendiri. Maka dengan adanya era teknologi yang berkembang saat ini harus dapat dipergunakan fasilitas yang ada sebaik mungkin dikarenakan kemampuan digital (*digital intelligence*) merupakan tuntutan yang harus dimiliki peserta didik pada era globalisasi sekarang (Muhammad et al., 2021).

Dalam arti lain penguatan pendidikan karakter berbasis teknologi informasi, pembelajaran pendidikan karakter dapat memanfaatkan teknologi digital seperti handphone, media sosial, internet, CDROM, media televisi, video maupun perfilm. Nilai-nilai pendidikan karakter yang diintegrasikan melalui media sosial, televisi, perfilm, akan lebih tertanam dalam jiwa peserta didik, karena pembelajaran melalui media ini akan lebih menarik dan lebih efektif (Hasanah et al., 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan karakter Pancasila, diperlukan adanya rancangan, pelaksanaan, dan penilaian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guna menjaga agar pemanfaatan internet tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan peserta didik menjadi manusia berkarakter Pancasila, berkecerdasan intelektual dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan terkait, hendaknya diterapkan prinsip-prinsip berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan sebaiknya mempertimbangkan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam keseluruhan pembuatan keputusan berteknologi internet.
2. Pemanfaatan teknologi informasi sebaiknya dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna untuk menggunakannya semata guna meningkatkan dirinya, baik dari segi intelektual, spiritual (rohani), sosial, maupun ragawi.
3. Pemanfaatan teknologi informasi sebaiknya menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan pentingnya kegiatan interaksi langsung dengan manusia (tatap muka), dengan lingkungan sosial-budaya (pertemuan, museum, tempat-tempat bersejarah), dan lingkungan alam (penjelajahan) agar tetap mampu memelihara nilai-nilai sosial dan humaniora (seni dan budaya), dan kecintaan terhadap alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pemanfaatan teknologi informasi sebaiknya menjaga bahwa kelompok sasaran tetap dapat mengapresiasi teknologi komunikasi yang sederhana dan kegiatan-kegiatan pembelajaran tanpa internet karena tuntutan penguasaan kompetensi terkait dalam rangka mengembangkan seluruh potensi anak didik secara seimbang.
5. Pemanfaatan teknologi informasi sebaiknya mendorong pengguna untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak hanya puas menjadi konsumen informasi berbasis internet (Muhtadi, 2016).

Penerapan Pendidikan Karakter Pancasila di Kalangan Pelajar

Membangun pendidikan karakter Pancasila terhadap anak-anak tidak bisa dilakukan seperti mentransfer ilmu pengetahuan, karena perlu pembiasaan dan penciptaan lingkungan

yang kondusif. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan karakter Pancasila dibutuhkan peran keluarga, sekolah dan pemerintah khususnya dalam penanaman nilai-nilai religiusitas, kekeluargaan, kerakyatan dan keadilan. Peran-peran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peran keluarga. Sebagai orangtua, perlu memahami cara agar internet aman diakses oleh anak-anak di rumah. Cara tersebut bisa dengan menentukan jenis media yang aman buat dipergunakan anak, contohnya komputer pribadi (PC) lebih baik daripada gawai seperti ponsel pintar (*smartphone*). Sempatkan waktu bersama anak dalam mengakses situs-situs yang aman buat mereka. Tanamkan pada anak untuk menghindari menyebarkan informasi pribadi seperti foto, email, alamat, telepon kepada pengguna internet lainnya. Orangtua juga perlu memonitor situs-situs yang diakses sang anak-anak. Keakraban antara orangtua dan anak seperti ini mengefektifkan penanaman karakter Pancasila dalam nilai-nilai kekeluargaan
2. Peran guru dan Sekolah. Sebagai guru harus membiasakan diri dalam memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu cara yang paling mudah dalam pendidikan karakter Pancasila diantaranya adalah penanaman nilai kejujuran. Para guru harus mampu menanamkan kejujuran dalam diri setiap peserta didik. Tidak berkata bohong dan dapat berkata benar dalam segala sikap dan tingkah lakunya. Nilai-nilai kejujuran tersebut dapat ditanamkan dan dikontrol melalui media sosial semisal *Facebook*, *Instagram*, *Tiktok* dan sejenisnya yang sedang *booming* saat ini, baik di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Sikap dan perkataan jujur peserta didik akan dengan mudah tertangkap jelas dari media sosial. Melalui media sosial guru dapat mengajak dialog dengan para anak didik, sehingga dapat terjalin komunikasi yang positif antara guru dan anak didik. Terjadinya komunikasi yang positif antara guru anak didik akan dapat membantu meningkatkan kualitas interaksi dan efektivitas pembelajaran. (Sugiarti, 2011).
3. Peran pemerintah. Pemerintah harus membuat dan menerapkan infrastruktur pendidikan berbasis teknologi informasi. Dikutip laman kemendikbud, pemerintah sudah membuat banyak platform dan ragam teknologi pembelajaran seperti pertama rumah belajar, televisi edukasi, radio edukasi, akun pembelajaran dan sebagainya yang dapat diakses guru dan siswa khususnya dalam materi pendidikan karakter (Suryaningsih, 2022).

Pemerintah juga harus mengeluarkan regulasi dan peraturan yang ketat, khususnya dalam bidang teknologi informasi sebagai realisasi penanaman pendidikan karakter. Contohnya pemerintah membuat regulasi dan Peraturan tentang pembatasan konten negatif yang mengandung unsur SARA, kebencian, pornografi dan kekerasan (Sudrajat, 2022). Pemerintah juga wajib melakukan penindakan hukum secara adil dan tidak tebang pilih. Dikutip dari laman Kemenkominfo pemerintah saat ini sudah mengembangkan pembatasan konten negatif yang dibagi menjadi tiga yakni *web filtering*, *Deep Packet Inspection (DPI)* dan *Websense Categories*. Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif (Kominfo RI, 2016). Peran ini menunjukkan pemerintah serius dalam menanamkan karakter Pancasila dalam nilai keselarasan, keadilan dan kerakyatan.

Agar proses penanaman penilaian pendidikan karakter lebih efektif harus ada penilaian yang dapat dilakukan dengan empat cara; Pertama, jika fungsi penilaian pendidikan karakter untuk mengarahkan tingkah laku maka seorang pendidik harus dapat menunjukkan bahwa ia mengajar sesuai dengan prinsip yang dianutnya dan bukan hanya sebagai ucapan (*lip*

service). Kedua, jika penilaian pendidikan karakter lebih bersifat preskriptif daripada deskriptif maka anak-anak harus diajarkan bahwa pendidikan karakter bukan hanya penilaian yang diucapkan tetapi merupakan pilihan prinsip yang harus ditentukan, agar dapat mengarahkan cara hidupnya. Ketiga, jika penilaian pendidikan karakter berhubungan dalam menguniversalkan preskriptif seseorang maka pendidikan karakter harus dapat mengajarkan anak bagaimana mereka dapat menyesuaikan diri dengan orang lain; sehingga hal ini akan membutuhkan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Keempat, jika keuniversalan berarti bahwa agen pendidikan karakter tidak dapat menerima keinginan dirinya terhadap orang lain maka pendidikan karakter harus mengajarkan anak-anak untuk saling mencintai (Raharjo, 2010).

KESIMPULAN

Keterlantaran emosi yang dihadapi pelajar Indonesia membuat mereka memiliki karakter dan sikap keras, eksplosif, antisosial, antipati dan antipeduli terhadap lingkungan sekitarnya. Padahal bangsa Indonesia memiliki karakter yang sudah turun temurun sejak dulu yang digagas Ki Hajar Dewantara dengan tujuan utama menjadi manusia beradab.

Era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya teknologi Informasi, berdampak pada perubahan karakter masyarakat yang jauh dari beradab. Pemanfaatan media berbasis teknologi informasi yang mudah, murah dan nyaris tanpa batasan menjadi salahsatu faktor pentingnya. Perlu kerjasama yang aktif dan konsisten baik masyarakat, sekolah dan pemerintah dalam upaya menguatkan kembali karakter bangsa. Ketiganya baik formal maupun informal menjadi poin penting demi menjaga dan memperkuat karakter dan budaya serta moral bangsa khususnya pelajar di masa mendatang. Terkhusus membangun karakter dan budaya berlandaskan Pancasila yang bernilai religius, kekeluargaan, keselarasan, keadilan dan kerakyatan. Bagaimanapun penerapan dari perkembangan teknologi dan informasi dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Indonesia khususnya dari sisi karakter dilakukan dengan metode kompetitif dan inovatif tanpa meninggalkan identitas dan falsafah bangsa. Karena sejatinya ilmu pendidikan yang tidak lahir dan tumbuh dari tanah yang diabdinya tidak akan pernah mampu melahirkan potensi yang muncul di tanah tersebut.

REFERENCES

- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan gender dan emansipasi perempuan dalam pendidikan Islam. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1-17.
- Adi, F. P. (2020). Arah pendidikan karakter pancasila era pandemi covid 19. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(4), 177-186.
- Alawiyah, F. (2012). Kebijakan dan pengembangan pembangunan karakter melalui pendidikan di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 3(1), 87-101.
- Budijarto, A. (2018). Pengaruh perubahan sosial terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 5-21.
- Fatah, R. A. (2021). MODEL MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS BOARDING SCHOOL DI JAWA BARAT DITINJAU DARI ETHICAL LEADERSHIP, TEACHER CAPACITY BUILDING DAN SCHOOL CULTURE. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Gabriel. (2022). Disrupsi Teknologi: Pengertian, Penyebab, Contoh, Manfaat. *Gramedia Blog*. <https://www.gramedia.com/best-seller/disrupsi-teknologi/>
- Hasanah, A., Arifin, B. S., Handayani, D., & Mumu, M. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Teknologi Informasi Untuk Membentuk Karakter Bangsa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 707-724.
- Irawati, D., Iqbal, A. M., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2022). Profil Pelajar Pancasila Sebagai Upaya Mewujudkan Karakter Bangsa. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1224-1238.
- Ismail, L. H. (2022). Moderasi Beragama di Lingkungan Pesantren: Pengalaman Pesantren di Bandung Barat, Jawa Barat. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(1), 29-44.
- KEMENPPPA RI. (2022). Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2022. KEMENPPPA RI. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kominfo RI. (2016). Pengendalian Konten Negatif Internet Dalam Usaha Mencerdaskan Bangsa. *Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo RI*. <https://aptika.kominfo.go.id/2016/11/pengendalian-konten-negatif-internet-dalam-usaha-mencerdaskan-bangsa/>
- Muhammad, G., Zakiah, Q. Y., & Erihadia, M. (2021). Implementasi pendidikan karakter religius melalui media pembelajaran berbasis teknologi. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(4), 481-495.
- Muhtadi, A. (2016). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (tik) dalam pendidikan karakter di sekolah. *Jurusan Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan FIP UNY*.
- Mulyadi, M., & Prakoso, L. Y. (2021). Mulyadi OPTIMASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA VUCA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 415-426.
- Nasional, K. P. (2011). Panduan pelaksanaan pendidikan karakter. *Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan*.
- Poernomo, B. (2020). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menyiapkan Pemimpin Masa Depan menghadapi Era VUCA. *Prosiding Seminar STIAMI*, 7(2), 70-80.
- Prasetyo, T., & Handayani, S. (2017). *Kebangkitan Jepang Pasca Pendudukan Amerika Serikat Tahun 1952-1964*.
- Purnomo, A. (2009). *Ideologi Kekerasan; Argumentasi Teologis-Sosial Radikalisme Islam*. Pustaka Pelajar.
- Rachmah, H. (2013). Nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *E-Journal WIDYA Non-Eksakta*, 1(1), 7-14.
- Raharjo, S. B. (2010). Pendidikan karakter sebagai upaya menciptakan akhlak mulia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 229-238.
- Samani, M., & Hariyanto, M. S. (2011). Konsep dan model pendidikan karakter. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Setia, P. (2021). Perilaku Keberagamaan Masyarakat Perdesaan Pasca Pembangunan PLTA Cisokan di Kabupaten Bandung Barat. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 15-27.
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) Sebagai Bentuk Kebijakan Politik Dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(1).
- Sugiarti, Y. S. Y. (2011). Peranan teknologi internet dalam membangun pendidikan karakter anak. *Jurnal Teknodik*, 145-154.
- Sugiyatno, S. (2010). Kekerasan Di Sekolah Bagian Masalah Pendidikan Sosial-Emosional. *Paradigma*, 5(09).
- Suryaningsih, S. I. (2022). Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran dalam Adaptasi Pandemi Covid-19. *Kemendikbudristek*. <https://pusdatin.kemdikbud.go.id/pemanfaatan-teknologi-pembelajaran-dalam-adaptasi-pandemi-covid-19/>

- Tilaar, H. A. R. (2004). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Rineka Cipta.
- Ubaedillah, A. (2015). *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zubaedi, M. A. (2015). *Desain Pendidikan Karakter*. Prenada Media.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).